

**SPELIALISASI DAN KONSENTRASI SPASIAL
INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA
SEMARANG**



USULAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**AGUSTINA
NIM. C2B006005**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Agustina

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006005

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : SPESIALISASI DAN KONSENTRASI SPASIAL
INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA
SEMARANG

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Oktober 2010

Tim Penguji :

1. Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, Msi (.....)

2. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)

3. Evi Yulia Purwanti, SE, MSi (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agustina, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Spesialisasi dan Konsentrasi Spasial Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 September 2010

Yang membuat pernyataan,

(Agustina)
NIM: C2B006005

ABSTRACT

Indonesia's development strategy is to achieve national objectives of achieving a just society, and prosperous. Economic development can be focused on regional economic development, because it will contribute to the development of the province and will also contribute to national development. Establishment of Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) by the City Government of Semarang in 2008, is the role of Semarang City Government in formulating policies for industrial development and small and focused and sustained. Development of Small and Medium Industries (IKM) will be more effective if supported by the existence of small-scale businesses, medium enterprises. IKM also requires the container to maintain its existence and develop themselves. One of the tasks is to develop IKM FEDEP through cluster approach, it also as a step to give more value to the IKM be able to compete in the free market.

The analytical method used is the Location Quotient index, Herfindahl index, and bilateral Krugman specialization index and the Ellison-Glaeser index in explaining specialization and spatial concentration of small and medium industries in the city of Semarang in years 1999 to 2006 analysis.

The result of the analysis are based on district, Semarang IKM concentrated in Sub Genuk (26,21%), and Gayamsari (12,77%). IKM seed subsector based on the specialization of Semarang district level are the manufacture of food, beverages and tobacco (ISIC 3.1) (25,81%), manufacture of textiles, wearing apparel and leather (ISIC 3.2) (20,46%), and the timber subsector and the like (ISIC 3.3) (18,36%). There are also several areas of concentration in Semarang IKM among Sub Genuk (ISIC 3.3), where the area of concentration is a concern because of agglomeration effect, and the District of Gayamsari (ISIC 3.9). In addition there are also several areas of concentration that is potential to develop IKM is District of Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candisari, and Tembalang (ISIC 3.4).

Key Words : Specialization, Spatial Concentration, Industry, IKM

ABSTRAK

Strategi pembangunan di Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan bangsa yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan ekonomi dapat difokuskan pada pembangunan ekonomi regional, karena akan memberikan kontribusi pada pembangunan propinsi dan juga akan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Terbentuknya *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2008, merupakan peran Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah yang terarah dan berkesinambungan. Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) akan lebih efektif apabila ditunjang dengan keberadaan usaha dengan skala kecil, menengah. IKM juga memerlukan wadah untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan diri. Salah satu tugas dari FEDEP adalah mengembangkan IKM melalui pendekatan klaster, hal ini juga sebagai langkah guna memberi nilai lebih pada IKM sehingga mampu bersaing di pasar bebas.

Metode analisis yang digunakan adalah indeks *Location Quotient*, indeks Herfindahl, indeks spesialisasi dan bilateral Krugman serta indeks Ellison-Glaeser dalam menjelaskan spesialisasi dan konsentrasi spasial industri kecil dan menengah di Kota Semarang dengan tahun analisis 1999 sampai 2006.

Hasil analisis yaitu berdasarkan kecamatan, IKM Kota Semarang terkonsentrasi di Kecamatan Genuk (26,21%), dan Gayamsari (12,77%). Subsektor IKM unggulan Kota Semarang berdasarkan spesialisasi tingkat kecamatan adalah subsektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1) (25,81%), subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 3.2) (20,46%), dan subsektor kayu dan sejenisnya (ISIC 3.3) (18,36%). Terdapat pula beberapa wilayah konsentrasi IKM di Kota Semarang di antaranya Kecamatan Genuk (ISIC 3.3), dimana wilayah konsentrasi tersebut terjadi karena adanya *agglomeration effect*, dan wilayah Kecamatan Gayamsari (ISIC 3.9). Selain itu juga terdapat beberapa wilayah konsentrasi IKM yang potensial untuk dikembangkan yaitu Kecamatan Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candisari, dan Tembalang (ISIC 3.4).

Kata Kunci : Spesialisasi, Konsentrasi Spasial., Industri, IKM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Tuhan YME atas kasih dan anugrah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Moch. Chabachib, M.Si, Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, Msi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segala kemudahan, nasehat dan saran yang tulus, dan pengarahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen wali yang dengan tulus telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menjalani studi di Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan IESP yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak Pramono, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Ibu Sri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Jawa Tengah dan Bappeda Kota Semarang. Mbak Indah, Badan Pusat Statistika Propinsi Jawa Tengah. Mas Adi, Badan Pusat Statistika Kota Semarang. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya yang telah membantu dan memberikan informasi guna penelitian skripsi ini.
7. Orangtua tercinta, kakak-kakak terimakasih untuk dukungan semangat dan materialnya selama ini. Terima kasih untuk ketulusannya serta selalu memberikan dorongan moral dan spiritual untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat PMK FE 2006 dan Sahabat-sahabat Jurusan IESP 2006 dan PMK FE yang setia menemaniku dalam suka dan duka sejak awal kuliah hingga menutup masa kuliahku.
9. Segenap staf dan karyawan FE UNDIP atas bantuannya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 12 Oktober 2010

Agustina

NIM. C2B006005

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
<i>Abstract</i>	iv
Abstraksi.....	v
Kata Pengantar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Konsentrasi Spasial.....	13
2.1.2 Klaster.....	15
2.1.3 Spesialisasi.....	19
2.1.4 Aglomerasi.....	20
2.1.5 Usaha Kecil dan Menengah.....	25
2.1.6 Industri Kecil dan Menengah.....	28
2.1.7 Industri Manufaktur.....	30
2.1.8 Teori Lokasi.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	40
3.3 Metode Analisis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.1.1 Letak Geografis.....	52
4.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	54
4.1.3 Perekonomian.....	57
4.1.4 Infrastruktur.....	57
4.1.5 Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang.....	59
4.2 Analisis Data dan Pembahasan	62
4.2.1 Spesialisasi dan Karakteristik Industri Kecil dan Menengah	

di Kota Semarang.....	65
4.2.2 Konsentrasi Spasial dan Distribusi Lokasional.....	69
4.2.3 Keterkaitan antara Spesialisasi dan Konsentrasi Spasial.....	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	88
5.3 Keterbatasan.....	89

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Pembagian di Kota Semarang.....	53
Gambar 4.2 Peta Pengelompokan Kecamatan Menurut Subsektor Industri di Kota Semarang Tahun 1999.....	80
Gambar 4.3 Peta Pengelompokan Kecamatan Menurut Subsektor Industri di Kota Semarang.....	81

LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 1999
- Lampiran 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2000
- Lampiran 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2001
- Lampiran 1.4 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2002
- Lampiran 1.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2003
- Lampiran 1.6 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2004
- Lampiran 1.7 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2005
- Lampiran 1.8 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah per Kecamatan Diperinci Menurut Lapangan Usaha Industri di Kota Semarang Tahun 2006
- Lampiran 2.1 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 1999
- Lampiran 2.2 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2000
- Lampiran 2.3 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2001
- Lampiran 2.4 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2002
- Lampiran 2.5 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan Kota Semarang Tahun 2003
- Lampiran 2.6 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2004
- Lampiran 2.7 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2005
- Lampiran 2.8 Konsentrasi Subsektor Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2006
- Lampiran 3.1 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 1999
- Lampiran 3.2 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2000
- Lampiran 3.3 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2001

- Lampiran 3.4 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2002
- Lampiran 3.5 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2003
- Lampiran 3.6 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2004
- Lampiran 3.7 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2005
- Lampiran 3.8 Spesialisasi pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2006
- Lampiran 4.1 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 1999
- Lampiran 4.2 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2000
- Lampiran 4.3 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2001
- Lampiran 4.4 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2002
- Lampiran 4.5 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2003
- Lampiran 4.6 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2004
- Lampiran 4.7 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2005
- Lampiran 4.8 LQ pada Subsektor di Kota Semarang Tahun 2006
- Lampiran 5.1 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 1999
- Lampiran 5.2 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2000
- Lampiran 5.3 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2001
- Lampiran 5.4 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2002
- Lampiran 5.5 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2003
- Lampiran 5.6 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2004
- Lampiran 5.7 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2005
- Lampiran 5.8 B-Spec Antar Kecamatan di Kota Semarang 2006
- Lampiran 6 Klasifikasi Industri Standar ISIC 2 Digit
- Lampiran 7 K_{SPEC} Indeks berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 1999 Sampai 2006
- Lampiran 8 H^S Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Menurut Subsektor Industri di Kota Semarang Tahun 1999 Sampai 2006
- Lampiran 9 g_{EG} , G_{EG} dan γ_{EG} IKM Menurut Subsektor di Kota Semarang Tahun 1999 Sampai 2002
- Lampiran 10 g_{EG} , G_{EG} dan γ_{EG} IKM Menurut Subsektor di Kota Semarang Tahun 2003 Sampai 2006

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dimana salah satunya strateginya adalah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi dapat difokuskan pada pembangunan ekonomi regional kabupaten dan kota, sebagai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan kabupaten dan kota akan memberikan kontribusi pada pembangunan Provinsi dan juga akan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional (Mudrajad, 2002). Salah satu ciri hal yang paling mencolok dari aktivitas ekonomi secara geografis adalah adanya konsentrasi yang menyebabkan ketimpangan (Fujita, et al, 1991).

Penjelasan klasik mengenai konsentrasi aktifitas ekonomi secara spasial biasanya merujuk pada dua macam eksternalitas ekonomi yaitu, penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi yang biasa disebut *agglomeration economies* (Henderson, 1988). Menurut Aiginger dan Hansberg (2003), konsentrasi dapat didefinisikan sebagai *regional share* yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu industri.

Fenomena konsentrasi spasial dapat ditemukan pada kebanyakan negara berkembang dimana distribusi penduduk dan konsentrasi industri terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Bangkok, New Delhi, Sao Paulo, dan

Jakarta, yang menandai suatu sistem spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam aglomerasi (Mudrajad, 2002).

Sebagaimana di negara-negara yang sedang berproses di dalam industrialisasi, tidak semua industri yang ada itu merupakan industri besar. Yang terkategori industri besar biasanya adalah industri-industri yang muncul karena proyek-proyek PMA atau proyek-proyek PMDN yang didirikan oleh keluarga-keluarga kaya. Tetapi, sebagian besar industri yang muncul adalah yang berkategori kecil menengah. Kelompok ini muncul bukan semata-mata karena sedang berproses di dalam industrialisasi. Kemunculan industri kecil menengah tidak jarang merupakan *multiplier effects* dari industri-industri besar (Kacung, 2005).

Dalam Tabel 1.1 kontribusi paling besar dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah adalah pada Sektor Industri manufaktur. Pembangunan sektor industri manufaktur (*manufacturing industry*) hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang (NSB), hal ini karena sektor industri manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin (*the leading sector*) yang mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian (Lincoln, 1991). Berdasarkan kenyataan ini tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara termasuk juga Indonesia.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas
Harga Konstan 2000, Provinsi Jawa Tengah Selama Tahun 2004-2008 (Juta
Rupiah) dan Kontribusi PDRB (Persen)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008		Rata-rata % kontribusi PDRB 5 Tahun
Pertanian dan Perikanan	28.6	29.9	31.0	31.8	33.4		20,48
Pertambangan dan Penggalian	06.237,28	24.624,25	02.199,11	62.697,6	84.064,44	%	
Industri Pengolahan	1.33	1.45	1.67	1.78	1.85		1,07%
Elektrik, Gas dan Air Bersih	0.759,58	4.230,59	8.299,61	2.886,65	1.189,43		32,03
Bangunan	43.9	46.1	48.1	50.8	53.1	%	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	95.611,83	05.706,52	89.134,86	70.785,69	58.962,88		0,83%
Pengangkutan dan Komunikasi	5.114,58	9.891,98	6.430,34	1.25	1.34		5,63%
Keuangan, Persewaan dan Perusahaan	8.715,4	0.948,49	6.566,35	5.728,78	7.593		21,12
Jasa-Jasa	43.045,24	56.962,75	16.441,85	98.013,93	26.196,01	%	
Total	28.3	30.0	31.8	33.8	35.6		4,98%
	6.51	6.98	7.45	8.05	8.65		
	0.447,43	8.425,75	1.506,22	2.597,04	7.881,95		3,61%
	4.82	5.06	5.39	5.76	6.21		10,26
	6.541,38	7.665,7	9.608,7	7.341,21	8.053,97		
	13.6	14.3	15.4	16.4	17.7	%	
	63.399,59	12.739,86	42.467,7	79.357,72	41.755,98		
	135.	143.	150.	159.	167.		100%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS

Kota Semarang ditetapkan sebagai pusat utama Jawa Tengah. Kecenderungan yang terjadi adalah perkembangan Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah. Hal ini merupakan salah satu indikator tingkat prestasi Kota Semarang terhadap kota-kota lain di Jawa Tengah. Sebagai ibukota Provinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah (Bappeda, 2006).

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota, Provinsi Jawa Tengah
Selama Tahun 2004-2008

Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
Kab. Cilacap	54,3	54,93	55,33	57,2	58,7	55,48
Kab. Banyumas	71,3	71,17	72,2	74,48	75,29	72,41
Kab. Purbalingga	16,3	16,34	17,18	18,06	19,19	17,38
Kab. Banjarnegara	96,2	96,81	97,95	98,35	99,01	97,40
Kab. Kebumen	93,2	93,18	94,2	95,08	96,52	94,31
Kab. Purworejo	64,3	64,17	65,85	67,23	68,08	65,79
Kab. Wonosobo	28,2	28,34	29,19	30,23	31,58	29,32
Kab. Magelang	01,4	01,03	02,62	03,91	04,21	02,55
Kab. Boyolali	86,4	86,42	87,08	88,19	89,08	87,41
Kab. Klaten	94,4	94,86	95,59	96,30	97,31	95,40
Kab. Sukoharjo	97,3	97,33	98,11	99,53	100,11	98,41
Kab. Wonogiri	53,2	53,10	54,31	55,07	56,07	54,40
Kab. Karanganyar	63,5	63,98	64,49	65,08	66,74	64,58
Kab. Sragen	63,3	63,93	64,16	65,18	66,73	64,92
Kab. Grobogan	20,2	20,78	21,74	22,00	23,37	21,81
Kab. Blora	28,3	28,75	29,07	30,85	31,95	29,78
Kab. Rembang	01,3	01,53	02,56	03,53	04,81	02,58
Kab. Pati	2,12	2,25	2,94	3,45	4,19	2,74
Kab. Kudus	56,5	56,70	57,40	58,48	59,23	57,48
Kab. Jepara	76,3	76,00	77,23	78,19	79,74	77,48
Kab. Demak	83,2	83,40	84,86	85,02	86,15	84,65
Kab. Semarang	75,3	75,46	76,11	77,81	78,72	76,37
Kab. Temanggung	37,3	37,92	38,99	39,31	40,03	38,72
Kab. Kendal	85,2	85,61	86,63	87,66	88,28	86,60
Kab. Batang	55,2	55,07	56,80	57,51	58,49	56,68
Kab. Pekalongan	66,3	66,39	67,98	68,21	69,59	67,66
Kab. Pemalang	35,3	35,84	36,05	37,72	38,47	36,68

Kab. Tegal	54	5, 4,	5 ,29	4 4	4 4	19	5, 4,	51 4,	5, 4,	5,25
Kab. Brebes	86	3, 6,	,83 ,71	3 5	4 5	71	2, 5,	79 17	5, 5,	4,79
Kota Magelang	74	4, 5,	,24 ,80	4 5	4 5	17	4, 5,	39 5,	5, 5,	3,87
Kota Surakarta	11	4, 5,	,24 ,80	4 5	4 5	43	4, 5,	82 5,	5, 5,	5,66
Kota Salatiga	25	4, 5,	,24 ,80	4 5	4 5	17	4, 5,	39 5,	5, 5,	4,44
Kota Semarang	04	4,	,12	4	5	71	5,	98	5,	4,99
Kota Pekalongan	86	3, 5,	,07 ,85	4 5	3 4	06	3, 5,	80 21	3, 5,	3,72
Kota Tegal	82	5, 4,	,85 ,87	5 4	4 4	15	5, 4,	21 51	5, 4,	5,38

Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka, BPS (Diolah)

Pengembangan Kota Semarang memiliki arah sebagai berikut:

1. Sebagai pusat kegiatan ekonomi untuk wilayah Jawa Tengah yang ditunjang dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas.
2. Sebagai kota utama yang secara sosio-ekonomi mempengaruhi perkembangan sistem perwilayahan Jawa Tengah.
3. Sebagai pusat urban yang menunjang kegiatan sosio-ekonomi wilayah.

Kota Semarang sebagai kota Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Tabel 1.2) dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perkonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar PDRB maupun PAD, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian pada perspektif dan pendekatan klaster dalam kebijakan nasional dan regional. Pendekatan klaster tersebut ditujukan pada sektor industri manufaktur untuk

mendorong spesialisasi produk serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas (Kompas, 19/8/2000). Di tahun 2006 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah menerapkan program pengembangan IKM dengan pendekatan Klaster. Dari hasil baseline studi FPESD, kendala dalam pembinaan IKM adalah program yang masih sektoral, belum adanya sinergi antar sektor, serta kurang melibatkan peran banyak pihak. Oleh sebab itu diperlukan dibentuknya lembaga pengembangan ekonomi lokal pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana lembaga itu terdiri dari Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Beberapa alasan memilih pendekatan klaster menurut Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah adalah pertama, sebagai pengembangan UMKM secara mengelompok yang akan mempermudah kebijakan dan pengalokasian sumberdaya. Kedua, yaitu berprinsip pada penguatan sumber daya lokal: potensi dari sumber daya manusia, mobilisasi *stakeholder* lokal, kerjasama dan kebersamaan, sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Bali Desa Mbangun Desa”, mendorong usaha mikro dan kecil mendapatkan manfaat *external economy* dan efisiensi kolektif serta meningkatkan produktifitas, *value added* dan penyerapan tenaga kerja. Kota Semarang sendiri membentuk *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) di tahun 2008.

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat tingkat Kesempatan Kerja mengalami trend yang menurun. Peningkatan jumlah penduduk bekerja di tahun 2005 dan

penurunan di tahun 2006, ternyata juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja IKM (2005) dan penurunan penyerapan tenaga kerja (2006) (lihat Tabel 1.3). IKM memiliki beberapa keunggulan dalam pelaksanaan usahanya. Keunggulannya yaitu memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini dikarenakan IKM dinilai lebih efisien, modal usahanya tidak terlalu besar, serta tenaga kerja yang diserap lebih banyak (Manggara, 2004). Oleh sebab itu, dengan meningkatnya jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerjanya, IKM diharapkan mampu memberi kontribusi besar dalam perekonomian.

Tabel 1.3
Tenaga Kerja Industri Besar Sedang dan Industri Kecil Menengah
di Kota Semarang
Selama Tahun 2004-2006 di Kota Semarang Dalam Orang dan Persen

Jenis Industri	2004		2005		2006	
IKM	5.551	4,24%	5.777	5,58%	1.893	0,34%
IBS	2.618	5,76%	8.535	4,42%	6.208	9,66%
Total	48.169	00%	44.312	00%	38.101	00%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS
 IKM : Industri Kecil dan Menengah
 IBS: Industri Besar dan Sedang

Tabel 1.4
Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja, di Kota Semarang
Tahun 2003-2008 Dalam Orang dan Persen

Tahun	Angka tan Kerja	Penduduk Bekerja	Mencari Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja
2003	978.94	599.554	379.386	61,24%
2004	962.91	570.509	392.402	59,25%
2005	952.05	633.432	318.618	66,53%
2006	1.176.	633.308	542.882	53,84%
2007	1.193.	663.053	530.247	55,58%

2008	414	1.215.	658.929	85.71	0	54,21%
------	-----	--------	---------	-------	---	--------

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka, BPS

Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai dengan pengembangan IKM yaitu melalui pendekatan kelompok serta membangun jaringan usaha yang saling terkait. Pendekatan pengembangan aktivitas usaha IKM secara berkelompok ini dikenal dengan istilah sentra, dimana beberapa IKM melakukan kegiatan usaha yang sejenis. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha IKM dalam sentra ini dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk klaster.

Kota Semarang telah membentuk *Forum for Economic Development and Employment Promotion* FEDEP sebagai pengembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan guna mengembangkan ekonomi daerah dan penciptaan/perluasan lapangan kerja. FEDEP menjadi salah satu sarana guna memberikan *platform ideal* untuk mendiskusikan isu-isu strategis atas pembangunan daerah dalam program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu tugasnya adalah mengembangkan IKM melalui pendekatan klaster.

Hingga saat ini FEDEP Kota Semarang telah membentuk 2 klaster. Pertama klaster hasil pengolahan ikan di wilayah Pantai Utara Kota Semarang yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur dan Genuk. Kedua adalah klaster batik semarangan yang berpusat di Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Terbentuknya *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2008, merupakan peran Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah yang terarah dan berkesinambungan. Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) akan lebih efektif apabila ditunjang dengan keberadaan usaha dengan skala kecil, dan menengah. IKM juga memerlukan wadah untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan diri. Salah satu tugas dari FEDEP adalah mengembangkan IKM melalui pendekatan kluster, hal ini juga sebagai langkah guna memberi nilai lebih pada IKM sehingga mampu bersaing di pasar bebas.

Masalah dari penelitian ini terkait pada Program FEDEP yang mengembangkan IKM di Kota Semarang dengan pendekatan kluster/kawasan. Kluster yang dibentuk hingga saat ini adalah kluster hasil pengolahan ikan (ISIC 3.1) di Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Serta Batik Semarangan (ISIC 3.2) di Kecamatan Semarang Timur. Penelitian ini akan melihat kesesuaian lokasi dan subsektor industri yang ditetapkan oleh FEDEP dengan potensi Kota Semarang dan lokasinya. Sehingga prioritas perencanaan ekonomipun diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara tepat sasaran dan menghemat anggaran Pemerintah Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan spesialisasi industri kecil dan menengah di Kota Semarang sesuai dengan potensi wilayahnya.
2. Mendeskripsikan dimana Industri Kecil Menengah di Kota Semarang terkonsentrasi secara spasial.
3. Melihat kesesuaian antara kebijakan FEDEP dengan hasil pembahasan.

Dari penelitian yang akan dilakukan diperoleh manfaat hasil penelitian antara lain:

1. Dapat mengetahui Industri Kecil Menengah yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Semarang.
2. Merupakan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Bagian Wilayah Kota melalui pengembangan Industri Kecil Menengah di masing-masing kecamatan di Kota Semarang guna mencapai pembangunan regional.
3. Memberi sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian/studi tentang analisis ekonomi regional
4. Menambah perbendaharaan kepustakaan untuk menambah wawasan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan IKM, spesialisasi dan konsentrasi spasial.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Pada Bab ini memuat pembahasan latar belakang masalah terkait dengan program Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan IKM dengan pendekatan klaster. Kontribusi PDRB Kota Semarang di sektor industri selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri ini. Pada bab ini juga menjabarkan tujuan dan kegunaan penelitian dan ruang lingkup penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini berisi landasan teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori peranan IKM dalam perekonomian termasuk didalamnya mengenai peranan IKM dalam pembangunan regional, teori mengenai spesialisasi, konsentrasi spasial industri yang meliputi klasifikasi klaster industri, industri manufaktur. Juga adanya penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan penelitian ini, sehingga dapat disusun kerangka pemikiran penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian : Pada Bab ini memaparkan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam bab ini adalah dengan studi kasus dengan menggunakan jenis data sekunder sehingga dapat disusun metode pengumpulan data sekunder (dokumenter). Data dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model

analisis nilai indeks untuk menjelaskan spesialisasi dan konsentrasi spasial di Kota Semarang.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini berisi deskripsi objek penelitian yaitu wilayah Kota Semarang dilihat dari sisi geografis, kependudukan dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan struktur industri kecil dan menengah Kota Semarang. Bab ini juga memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan. Bagian pembahasan menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian secara komprehensif.

Bab V Penutup : Bab ini merupakan penutup yang merangkum dan memberi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian serta menyebutkan beberapa kelemahan studi dari penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsentrasi Spasial

Konsentrasi spasial merupakan pengelompokan setiap industri dan aktivitas ekonomi secara spasial, dimana industri tersebut berlokasi pada suatu wilayah tertentu (Fujita et, al 1999). Krugman menyatakan bahwa dalam konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial, ada 3 hal yang saling terkait yaitu interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan. Untuk mendapatkan dan meningkatkan kekuatan skala ekonomis, perusahaan-perusahaan cenderung berkonsentrasi secara spasial dan melayani seluruh pasar dari suatu lokasi. Sedangkan untuk meminimalisasi biaya transportasi, perusahaan-perusahaan cenderung berlokasi pada wilayah yang memiliki permintaan lokal yang besar, akan tetapi permintaan lokal yang besar cenderung berlokasi di sekitar terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, seperti kawasan industri maupun perkotaan (Fujita et, al 1999).

Konsentrasi spasial adalah aktivitas ekonomi secara spasial menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses yang selektif dan hanya terjadi pada kasus tertentu bila dipandang dari segi geografis. Sebagai contoh: di Amerika Serikat, mayoritas industri manufaktur telah sekian lama terkonsentrasi pada suatu lokasi yang disebut “sabuk manufaktur” (Fujita et, al 1999).

Konsentrasi spasial telah menjadi kajian yang menarik dan populer. menariknya, di kebanyakan negara berkembang, distribusi penduduk dan konsentrasi industri terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Bangkok, New Delhi, Sao Paulo, dan Jakarta, yang menandai suatu sistem spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam aglomerasi perkotaan (Mudrajad, 2002).

Konsentrasi spasial didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang terspesialisasi dimana berkumpulnya perusahaan pada suatu lokasi akan mendorong berkumpulnya tenaga kerja yang terspesialisasi, sehingga menguntungkan perusahaan dan tenaga kerja. Selain itu, berkumpulnya perusahaan atau industri yang saling terkait akan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan input yang terspesialisasi yang lebih baik dan lebih murah. jarak yang tereduksi dengan adanya konsentrasi spasial akan akan memperlancar arus informasi dan pengetahuan (*knowledge spillover*) pada lokasi tersebut (Mudrajad, 2002).

Konsentrasi Spasial menunjukkan *share* suatu wilayah dan distribusi lokasi dari suatu industri. Apabila suatu distribusi spasial suatu industri tidak merata, dan ada wilayah yang mendominasi berlokasinya industri, maka menunjukkan bahwa industri terkonsentrasi secara spasial di wilayah tersebut (Aiginger dan Hansberg, 2003). Menurut OECD konsentrasi spasial menunjukkan bahwa industri tidak berlokasi secara merata pada seluruh wilayah, akan tetapi mengelompok secara berdekatan pada bagian tertentu pada wilayah tersebut (OECD, 2000).

2.1.2 **Klaster (*Cluster*)**

Fenomena yang sekarang banyak berkembang pada bidang industri adalah terbentuknya klaster industri geografis dimana antar perusahaan yang ada didalamnya memiliki hubungan saling ketergantungan yang kuat. Konsentrasi perusahaan-perusahaan yang memiliki kesamaan proses produksi maupun saling melengkapi kebutuhan input, mendominasi pasar dunia belakangan ini. Sebuah perusahaan akan memilih lokasi kerja yang berdekatan dengan perusahaan penghasil bahan bakunya. Sebuah perusahaan akan memilih lokasi kerja yang berdekatan supplier, konsumen, maupun kompetitor mereka karena hal tersebut akan menurunkan biaya transaksi, serta membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan membuat usaha adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah. Klaster digunakan untuk menggambarkan konsentrasi perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan sinergi karena faktor kedekatan geografis maupun hubungan ketergantungan diantara mereka walaupun bukan merupakan kumpulan perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja secara dominan (Zainal, 2005)

Marshall (Kacung Marijan, 2005) mengemukakan klaster industri pada dasarnya merupakan kelompok aktifitas produksi yang amat terkonsentrasi secara spasial dan kebanyakan terspesialisasi pada satu atau dua industri utama saja. Marshall juga menekankan pentingnya tiga jenis penghematan eksternal yang memunculkan sentra industri: konsentrasi pekerja terampil, berdekatannya para pemasok spesialis, dan tersedianya fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan. Adanya jumlah pekerja terampil dalam jumlah yang besar memudahkan terjadinya penghematan dari sisi tenaga kerja. Lokasi para pemasok yang

berdekatan menghasilkan penghematan akibat spesialisasi, yang muncul dan terjadinya pembagian kerja yang meluas antar perusahaan dalam aktifitas dan proses yang saling melengkapi. Tersedianya fasilitas untuk memperoleh pengetahuan terbukti meningkatkan penghematan akibat informasi dan komunikasi melalui produksi bersama, penemuan dan perbaikan dalam mesin, proses dan organisasi secara umum.

Secara singkat, klaster adalah firm-firm yang terkonsentrasi secara parsial dan saling terkait dalam industri (Porter, 1998). Klaster sebagai konsentrasi geografis yang terbentuk dari keterkaitan kebelakang, keterkaitan kedepan, keterkaitan vertikal dan keterkaitan tenaga kerja (Nadvi dan Schmitz, 1999).

Ada tiga bentuk klaster berdasarkan perbedaan tipe dari eksternalitas dan perbedaan tipe dari orientasi dan intervensi kebijakan (Kolehmainen, 2002), yaitu :

1. *The Industrial Districts Cluster*

Industrial district cluster atau yang biasa disebut dengan Marshallian Industrial District adalah kumpulan dari perusahaan pada industri yang terspesialisasi dan terkonsentrasi secara spasial dalam suatu wilayah (Marshall, 1920). Pandangan Marshall mengenai industrial district masih relevan sampai saat ini dan secara empiris masih dapat dijumpai. Dalam perspektif lebih modern (Fujita et al, 1999; Porter, 1990), industrial district cluster berbasis pada eksternalitas sebagai berikut:

- a. penurunan biaya transaksi (misalnya, biaya komunikasi dan transportasi)

- b. tenaga kerja yang terspesialisasi (misalnya, penurunan biaya recruitment tenaga kerja yang terspesialisasi dan penurunan biaya untuk pengembangan sumber daya manusia)
- c. Ketersediaan sumber daya, input dan infrastruktur yang spesifik dan terspesialisasi (misalnya pelayanan spesial dan tersedia sesuai dengan kebutuhan lokal)
- d. Ketersediaan ide dan informasi yang maksimal (misalnya mobilitas tenaga kerja, knowledge spillover, hubungan informal antar perusahaan).

Intinya, industrial district, terjadi secara alamiah dan bersifat “open membership”. Dalam industrial district tidak memerlukan investasi dalam membangun relationship. hal ini menunjukkan bahwa jenis klaster ini dapat muncul tanpa memerlukan usaha untuk memunculkannya. Selain itu Ciri-ciri dari industrial district dapat teridentifikasi dalam area metropolitan dan kota-kota lain yang memproduksi jasa dalam skala yang tinggi. (Gordon dan McCann, 2000).

2. *The industrial complex cluster.*

Industrial complex cluster berbasis pada hubungan antar perusahaan yang teridentifikasi dan bersifat stabil yang terwujud dalam perilaku spasial dalam suatu wilayah. Hubungan antar perusahaan sengaja dimunculkan untuk membentuk jaringan perdagangan dalam klaster. Model kompleks industri pada dasarnya lebih stabil daripada model distrik industri. Hal ini karena pada model kompleks industri diperlukan investasi dalam menjalin hubungan dengan perusahaan – perusahaan dalam klaster ini. Dimana hubungan yang terjadi berdasarkan atas pertimbangan yang mantap dalam pengambilan keputusan.

Dengan kata lain klaster ini (komplek industri) terjadi karena perusahaan-perusahaan ingin meminimalkan biaya transaksi spasial (biaya transportasi dan komunikasi) dan memiliki tujuan-tujuan tertentu baik secara implisit ataupun eksplisit dengan menempatkan perusahaannya dekat dengan perusahaan-perusahaan lain. Dalam beberapa kasus, terjadinya klaster industri didorong oleh adanya suatu perusahaan yang mengekspor produk akhir ke pasar internasional, yang menjadi mesin penggerak bagi perusahaan-perusahaan lain untuk berada pada klaster tersebut.

3. *The Social Network cluster.*

Social Network cluster menekankan pada aktifitas sosial, ekonomi, norma-norma institusi dan jaringan. Model ini berdasarkan pada kepercayaan dan bahkan hubungan informal antar personal. hubungan interpersonal dapat menggantikan hubungan kontrak pasar atau hubungan hirarki organisasi pada proses internal dalam klaster. Harrison (1992) menyatakan bahwa konsentrasi spasial pada klaster ini merupakan konteks alami yang terbentuk karena adanya hubungan informal dan modal sosial yang berupa kepercayaan, karena hal tersebut yang membentuk dan menjaga melalui persamaan sosial dan sejarah dan terus menerus melakukan kegiatan bersama dan saling berbagi. Perlu diingat bahwa jaringan sosial antar perusahaan tidak perlu dibentuk dalam ruang lingkup regional ataupun lokal karena kedekatan wilayah dan budaya dapat memfasilitasi terbentuknya proses tersebut.

2.1.3 Spesialisasi

Menurut OECD (2000), spesialisasi industri menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dikuasai oleh beberapa industri tertentu. Suatu wilayah dapat diartikan sebagai wilayah yang terspesialisasi apabila dalam sebagian kecil industri pada wilayah tersebut memiliki pangsa yang besar terhadap keseluruhan industri. Struktur industri yang terspesialisasi pada industri tertentu menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki keunggulan berupa daya saing pada industri tersebut.

Terbentuknya klaster industri di suatu wilayah yang terjadi akibat proses aglomerasi menyebabkan wilayah tersebut menjadi terspesialisasi pada suatu industri. Menurut Aiginger dan Hansberg (2003), terdapat perbedaan makna antara spesialisasi dan konsentrasi. Spesialisasi dapat didefinisikan sebagai distribusi *share* industri dari suatu wilayah. Sedangkan Konsentrasi dapat didefinisikan sebagai *regional share* yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu industri. Pada wilayah yang terspesialisasi, konsentrasi menunjukkan tingkatan aktivitas dan distribusi lokasional dari industri pada wilayah tersebut, dimana pada umumnya aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi wilayah core daripada periphery. Dengan adanya spesialisasi, *share* wilayah yang merupakan lokasi industri diluar industri utama relatif lebih rendah daripada *share* wilayah yang merupakan lokasi industri utama yang merupakan spesialisasi wilayah tersebut. Dengan adanya hal tersebut, kontribusi industri utama pada suatu wilayah yang terspesialisasi akan lebih besar daripada kontribusi industri tersebut pada wilayah yang lain. Hal tersebut akan menimbulkan distribusi spasial dari

industri dimana industri tersebut cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu (wilayah yang terspesialisasi pada industri tersebut). Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa suatu industri akan cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang terspesialisasi pada industri tersebut.

2.1.4 Aglomerasi

Aglomerasi mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah proses yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan mobilitas secara spasial. Pengertian kedua menjelaskan suatu bentuk lokasional, terutama bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Konsep aglomerasi ekonomi bersumber dari fenomena nyata dan diawali oleh teori lokasi yang dikemukakan Weber, dimana menurut Weber, ada 3 faktor yang menjadi alasan firm dalam menentukan lokasi industri, yaitu:

1. Perbedaan biaya transportasi

Produsen cenderung mencari lokasi yang memberikan keuntungan berupa penghematan biaya transportasi serta dapat mendorong efisiensi dan efektivitas produksi

2. Perbedaan biaya upah

Produsen cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan aktivitas ekonomi sedangkan tenaga kerja cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah yang lebih tinggi

3. Penghematan aglomerasi

Penghematan aglomerasi adalah penghematan yang terjadi terkonsentrasinya aktivitas ekonomi secara spasial, yaitu *localization economies* dan *urbanization economies*. Pengertian mengenai aglomerasi juga dikemukakan oleh Montgomery (Erlangga, 2004) yang mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena ”penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen”. Hal serupa juga dijelaskan oleh Markusen (Erlangga, 2004) yang menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang ”tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa; dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri (Mudrajad, 2002).

Perkembangan konsep mengenai aglomerasi didefinisikan dalam dua bagian, yaitu dengan perspektif Klasik dan Modern. Perspektif Klasik percaya bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial dan diasosiasikan dengan konsep ”penghematan akibat aglomerasi” (*economies of agglomeration*) melalui konsep eksternalitas. Para pendukung perspektif ini mendasarkan pada dasar-dasar model mikro mengenai eksternalitas akibat skala ekonomis (Fujita & Ogawa, 1982; Fujita & Thisse, 1996 dalam Mudrajad, 2002). Para ahli ekonomi perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi aglomerasi secara spasial. Ini yang pada gilirannya mendorong tumbuhnya literatur mengenai formasi kota (Mudrajad, 2002).

Perspektif Klasik mengkaitkan aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial dengan konsep "penghematan aglomerasi" melalui konsep eksternalitas. Para ekonom biasanya membedakan antara: Penghematan internal dan eksternal (*internal economies dan external economies*). Penghematan internal adalah suatu pengurangan biaya secara internal di dalam suatu perusahaan atau pabrik. Seberapa jauh pengurangan biaya dapat dicapai pada suatu perusahaan tergantung apakah efisiensi dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Beberapa faktor yang berperan dalam pengurangan biaya secara internal meliputi; pembagian kerja (spesialisasi), digantinya tenaga manusia dengan mesin, melakukan sub-kontrak beberapa aktifitas proses produksi kepada perusahaan lain, dan menjaga titik optimal operasi yang meminimalkan biaya (Toyne, 1974 dalam Mudrajad, 2002).

Penghematan eksternal merupakan pengurangan biaya yang terjadi akibat aktifitas di luar lingkup perusahaan atau pabrik. suatu atau beberapa industri dapat meraih penghematan eksternal dengan beraglomerasi secara spasial. Penghematan biaya terjadi berkat adanya perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama bersaing satu sama lain dalam memperoleh pasar atau konsumen. Penghematan juga terjadi karena adanya tenaga terampil dan bahan baku dalam daerah tersebut, yang menopang jalannya usaha perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa daerah perkotaan menawarkan manfaat aglomerasi industri maupun penduduk, yang diperkuat dengan adanya sarana dan prasarana seperti pendidikan, air, transportasi, dan hiburan, yang memungkinkan adanya penghematan biaya. Jalinan keterkaitan antara berbagai macam faktor ini akibat proses urbanisasi dan industrialisasi disebut sebagai aspek positif dari *cumulative causation*.

Penghematan akibat skala ekonomis dan cakupan (*economies of scale* dan *economies of scope*) terjadi karena perusahaan menambah produksi dengan cara memperbesar pabrik (skala ekonomi). Penghematan akibat produksi per unit dapat ditekan. Hal ini berbeda dengan penghematan akibat cakupan yang terjadi karena sejumlah aktivitas atau sub-unit usaha secara internal maupun eksternal dapat dilakukan pada saat yang bersamaan sehingga menghemat biaya.

Dalam perspektif modern menunjukkan beberapa kelemahan teori Klasik mengenai aglomerasi. Pada konteks ini, tiga jalur pemikiran dapat diidentifikasi. Pertama, teori-teori baru mengenai eksternalitas dinamis (*dynamic externalities*). Kedua, mazhab pertumbuhan kota. Ketiga, paradigma berbasis biaya transaksi. Perspektif modern berpendapat bahwa teori neoklasik kurang tepat digunakan sebagai dasar analisis spasial. Hal ini disebabkan adanya dua fenomena yang sering dijumpai dalam praktek namun tidak mampu dijelaskan dengan paradigma yang ada (McCann, 1995 dalam Erlangga 2004). Pertama, banyak perusahaan memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki, kaitan transaksi dengan perusahaan-perusahaan lokal pada industri yang sama kendati terdapat kluster industri yang kuat di daerah tersebut. Kedua, banyak perusahaan hanya memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki, kaitan transaksi sama sekali dengan perusahaan lain ataupun rumah tangga dalam suatu daerah yang sama (biasanya perkotaan) kendati daerah tersebut memiliki berbagai kluster industri. Karena itu, validitas konsep penghematan lokalisasi (baca: fenomena yang pertama) dan penghematan urbanisasi (baca: fenomena yang kedua) menjadi dapat

dipertanyakan. Apalagi pertanyaan fundamental mengapa aglomerasi tetap terjadi di daerah-daerah tertentu masih belum terjawab tuntas.

Berdasarkan Klasifikasi yang dikemukakan oleh Heigel dan Mayer, 2003 dalam Erlangga, 2004), aglomerasi mengandung dua pengertian. Pertama adalah proses yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan mobilitas secara spasial, kedua adalah suatu bentuk lokasional, terutam bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Aglomerasi merupakan proses pengelompokan dari aktivitas ekonomi secara spasial yang tidak secara kumulatif oleh beberapa alasan logis (Fujita, et al, 1999).

Zainal Arfin dan Nazaruddin Malik (2005) mengemukakan bahwa suatu daerah pada umumnya dan suatu kota pada khususnya berkembang karena aglomerasi. Perkembangan kota-kota dan daerah-daerah tidak dapat terjadi tanpa aglomerasi (Isard,1975 dalam Zainal, 2005). Karena aglomerasi, perusahaan-perusahaan dapat melakukan produksi dengan biaya (rata-rata) yang lebih rendah atau yang sering disebut dengan penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*). Ada dua macam *agglomeration economies*; Pertama, penghematan lokalisasi (*Localization economies*) terjadi bila biaya total rata-rata (produksi) dari perusahaan-perusahaan yang sejenis (dalam suatu industri) pada lokasi yang sama turun, bila jumlah produksi dari industri itu naik. Kedua, penghematan urbanisasi (*urbanization economies*) terjadi bila biaya total rata-rata (produksi) dari tiap perusahaan turun, bila jumlah produksi dari berbagai industri disuatu lokasi yang sama naik. Aglomerasi bisa berarti sama dengan klaster apabila hanya terjadi

dalam suatu industri, akan tetapi aglomerasi industri lebih mengarah kepada penjelasan mengenai terbentuknya atau berkembangnya suatu klaster.

Aglomerasi dapat disimpulkan berkaitan dengan konsentrasi dari beberapa fasilitas pendukung yang melayani industri-industri baik pada klaster maupun kota, dimana keberadaan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya konsentrasi spasial. Armstrong dan Taylor (2000) menjelaskan bahwa fasilitas tersebut adalah transportasi, pasar tenaga kerja yang terorganisir dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian yang beraneka ragam, pelayanan dari pemerintah dan sarana publik, pelayanan jasa komersial, aktivitas yang berorientasi pasar.

2.1.5 Usaha Kecil dan Menengahs

UKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi regional yang mampu mereduksi ketimpangan. Pentingnya peran UKM dalam pembangunan regional tercermin dari UKM sebagai faktor-faktor pembangunan asli. Adanya dampak positif yang berlanjut dari keberadaan UKM dalam pembangunan daerah. Kontribusinya terhadap pembangunan lokal atau daerah adalah kemampuannya menggali potensi daerah sekaligus menentukan pola pembangunan ekonominya.

Pengertian UKM dikelompokkan dalam 2 bagian, menurut pengertian klasik dan modern:

1. Menurut pengertian klasik UKM berperan dalam proses :

- Industrialisasi
- Penyerapan Tenaga Kerja
- Penyediaan Barang dan Jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah

- Pembangunan Ekonomii Pedesaan
2. Pengertian modern memandang pentingnya eksistensi dan perkembangan UKM berkaitan dengan spesialisasi yang fleksibel dalam berproduksi dan ekspor. UKM sebagai faktor pembangunan regional yang bersifat *endogenous* memiliki akar dengan struktur ekonomi lokal. Sedangkan berdasarkan undang-undang terbaru yaitu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008
Berdasarkan Asset dan Omzet

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber :Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

2.1.6 Industri Kecil dan Menengah

Definisi industri kecil menurut Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah yang diterbitkan Disperindag Republik Indonesia (2002) yaitu, industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta rupiahdan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar satu milyar rupiah atau kurang.

Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa

untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah.

Menurut BPS, skala usaha digolongkan berdasarkan jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Pegawai
Menurut Badan Pusat Satatistik

Keterangan	Jumlah
Industri Mikro	1 – 4 orang
Industri Kecil	5 – 9 orang
Industri Menengah	20 – 99 orang
Industri Besar	100 orang ke atas

Sumber : Sensus Ekonomi Kota Semarang 2006

Untuk membatasi permasalahan, maka diperlukan kriteria industri kecil, menengah agar pembahasan permasalahan dapat lebih terarah dan jelas. Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang disusun oleh Disperindag (2002) mengidentifikasi karakteristik industri kecil menengah sebagai berikut:

- a. Bahan bakunya mudah diperoleh, terutama karena tersedianya di daerah.
- b. Menggunakan teknologi sederhana, sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- c. Ketrampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- e. Sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup kemungkinan untuk diekspor.
- f. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.

- g. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah.

2.1.7 Industri Manufaktur

Industri merupakan suatu kegiatan atau usaha mengolah bahan atau barang agar memiliki nilai yang lebih baik untuk keperluan masyarakat di suatu tempat tertentu. Pada hakekatnya pembangunan industri ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang, yaitu struktur ekonomi dengan titik berat pada industri yang maju dan didukung oleh pertanian yang tangguh. Menurut M. Huda (BPS, 2006) “pembangunan industri secara nyata harus menjadi penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi penyedia lapangan kerja yang sudah mulai tidak tertampung pada sektor pertanian.”. “industri manufaktur ialah setiap usaha yang merupakan unit produksi yang membuat barang untuk kebutuhan masyarakat di suatu tempat tertentu” (Bintaro dalam BPS, 2006). Sedangkan menurut BPS, “Industri manufaktur merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.” (BPS, 1999).

Menurut BPS, di Indonesia industri dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih
- b. Industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang
- c. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang.

- d. Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang.

2.1.8 Teori Lokasi

Peranan teori lokasi dalam ilmu ekonomi regional sama halnya dengan teori mikro dan makro pada analisa tradisional. Dengan demikian analisa ekonomi regional tidak dapat dilakukan tanpa peralatan teori lokasi.

Secara garis besar teori lokasi dapat dikategorikan atas 3 kelompok utama. Pertama, *Least Cost Theory* yang menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur-unsur pasar dan permintaan. Pelopor ini ini adalah Alfred Weber 1909 (Robinson, 2005) yang beranggapan bahwa ada tiga faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi perusahaan industri yaitu, ongkos transpor, perbedaan upah buruh dan kekuatan aglomerasi. Analisa *least cost* ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain:

1. Lokasi pasar dan sumber bahan baku telah tertentu,
2. Sebahagian bahan baku adalah localized materials,
3. Tidak terjadi perubahan tehnologi (*fixed technical coefficients*),
4. Ongkos transport tetap setiap kesatuan produksi dan jarak.

Weber menyederhanakan persoalan pemilihan lokasi industri dalam bentuk Varignon problem yang kemudian dikenal dengan nama *Weberian Locational Triangle*. Weber menyimpulkan bahwa lokasi optimum dari suatu perusahaan industri umumnya terletak dimana permintaan terkonsentrasi (pasar) atau sumber bahan baku. Alasan yang diberikan adalah bila suatu perusahaan

industri memilih lokasi pada salah satu dari kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku dan hasil produksi akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat pula dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dalam proses produksi berat barang berkurang (*weight loosing process*), lokasi optimum akan berada pada sumber bahan baku. Sebaliknya bila dalam proses produksi bila dalam proses produksi berat barang bertambah (*weight gaining process*), lokasi optimum akan berada pada pasar. Hanya bila industri menggunakan proses *footloose*, perusahaan akan dapat bebas kedua alternatif lokasi tersebut. Moses (Emilia dan Imelia, 2006) mencoba menggabungkan dengan teori produksi ala *Neo Classic*. Ia menyimpulkan *return to scale* akan mempengaruhi pemilihan lokasi. Ini merupakan awal mempertimbangkan faktor teknologi pada teori lokasi melalui perubahan pada koefisien produksi.

Kelompok teori lokasi yang kedua dinamakan *Market Area theory* yang dipelopori oleh August Losch (Robinson, 2005), menurut kelompok ini faktor permintaan lebih penting artinya dalam persoalan pemilihan lokasi. Bila permintaan terhadap suatu barang adalah elastis terhadap harga, diperkirakan akan timbul berbagai pengaruh terhadap pemilihan lokasi perusahaan. Di samping itu adanya unsur persaingan antar tempat (*spatial competition*) diantara sesama produsen menentukan pula tingkah laku perusahaan dalam memilih lokasi. Teori Market Area disusun atas dasar beberapa asumsi utama yaitu :

1. Konsumen tersebar secara merata keseluruh tempat,
2. Bentuk persamaan permintaan dianggap sama, dan

3. Ongkos angkut untuk setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama.

Berdasarkan ketiga asumsi ini, teori ini berkesimpulan bahwa pemilihan lokasi perusahaan akan lebih banyak ditentukan oleh besarnya ongkos angkut untuk hasil produksi dan tingkat persaingan sesama produsen di pasar.

Penelitian empiris pertama tentang teori area pasar dilakukan oleh Reilly (Robinson, 2005), hasil penelitian ini ternyata sangat memuaskan sehingga penemuan yang didapat kemudian dikenal dengan hukum Reilly yang berbunyi: lokasi perusahaan industri cenderung terkonsentrasi pada beberapa pusat sedangkan jumlah industri yang masuk ke konsentrasi tersebut sebanding dengan luas daerah pasar (diukur dengan jumlah penduduk) dan berhubungan terbalik dengan jarak antara pusat dengan daerah pinggiran daerah pasar.

Kelompok teori lokasi ketiga, lazim dinamakan sebagai *Bid Rent Theory* yang dipelopori oleh Von Thunen, menurut kelompok ini pemilihan lokasi perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk membayar sewa tanah. Tentunya teori ini lebih banyak berlaku untuk pemilihan lokasi pada daerah perkotaan dimana harga dan sewa tanah sangat tinggi sehingga merupakan bagian ongkos produksi yang cukup menentukan. *Teori Bid Rent* disusun atas beberapa asumsi tertentu yaitu :

1. Terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai tingkat kesuburan yang sama,
2. Ditengah tanah tersebut terdapat sebuah pusat produksi dan konsumsi yang menggunakan hasil pertanian yang diproduksi didaerah sekitarnya,
3. Ongkos angkut sama untuk setiap kesatuan jarak produksi,

4. Harga barang produksi juga sama untuk setiap jenis produksi.
5. Tidak terjadi perubahan teknologi (*fixed technical coefficient*).

Berdasarkan asumsi tersebut, teori *bid rent* berkesimpulan bahwa lokasi perusahaan industri akan sangat ditentukan oleh titik kesamaan antara kemampuan perusahaan untuk membayar sewa tanah (*bid-rent*) dan besarnya sewa tanah yang diinginkan oleh sipemilik tanah (*land-rent*). Variabel penentu dalam proses penentuan lokasi industri yaitu:

1. Limpahan sumber daya (*resources endowment*). Adalah tersedianya sumber daya yang digunakan sebagai faktor produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif di suatu wilayah.
2. Permintaan Pasar Luas pasar ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan. Pasar mempengaruhi lokasi melalui 3 unsur : ciri-ciri pasar, biaya distribusi dan harga yang terdapat di pasar yang bersangkutan.
3. Aglomerasi yang merupakan sekumpulan klaster industri.
4. Kebijakan Pemerintah dan Wiraswasta.

Kebijakan pemerintah: dorongan, hambatan, larangan (kebijaksanaan fiskal)

Kebijakan Wiraswasta : Pusat perusahaan, lokasi cabang

- Fungsi unit produksi
- Fungsi unit distribusi
- Fungsi unit Pemasaran.

2.1.9 FEDEP

Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan kelembagaan ekonomi kerakyatan dengan nama FPSED (forum pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya), sejalan dengan hal tersebut di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah telah terbentuk kelembagaan yang disebut FEDEP dan Kota Semarang sesuai dengan surat Gubernur dan Kepala Bappeda diharapkan segera menyusul untuk membentuk FEDEP tersebut, yang diharapkan dapat terjalin komunikasi antar kabupaten dan Kota se Jawa Tengah.

FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion) atau forum pengembangan ekonomi dan penciptaan atau perluasan lapangan kerja merupakan forum kemitraan yang terlembaga bagi para pelaku di daerah yang relevan bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha bersama, FEDEP menggabungkan organisasi dan individu dari sector public maupun swasta.

Sebagai badan penasehat bagi rencana kebijakan dan bukan merupakan badan eksekutif, FEDEP memberikan platform ideal untuk mendiskusikan isu-isu strategis arah pembangunan daerah program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

A. Dasar Pelaksanaan

Dasar untuk melaksanakan inisiasi dan pembentukan FEDEP Kota Semarang adalah

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No:500.05/30/30/2003 Mengenai Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah.

- Surat Gubernur Jawa Tengah No. 581/951/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota tentang pengembangan dan pembentukan FEDEP
- Surat Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah No : 500/11764 tanggal 9 Juli 2007 perihal Fasilitas Pengembangan Kelembagaan FEDEP yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.
- Perda Kota Semarang No.500/ A.003 tentang Pembentukan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) di Kota Semarang sebagai Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan guna pengembangan ekonomi daerah dan penciptaan/ perluasan lapangan kerja.

B. Tujuan

Tujuan inisiasi dan pembentukan FEDEP:

- Menyampaikan informasi, arti penting kelembagaan FEDEP bagi pengembangan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan daya saing produk daerah dan perluasan kesempatan kerja.
- Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka memformulasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
- Membantu menentukan prioritas sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
- Menggerakkan sumber daya lokal (mobilitas modal, program, aktifitas) guna percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Manfaat dan Peran FEDEP

Manfaat FEDEP:

- Terciptanya mekanisme perencanaan yang lebih partisipatif dengan peran sektor swasta.
- Terlaksananya dialog antar stakeholder dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.
- Semarang diharapkan mempunyai ciri-ciri khas produk-produk klaster sebagai potensi unggulan.
- Perhatian pengambil kebijakan terhadap pengembangan UKM dan IKM.
- Terjalin koordinasi dan sinergitas program kabupaten/ kota klaster provinsi maupun pusat.

D. Peran FEDEP:

- Mempersatukan persepsi para stakeholder untuk berdiskusi tentang pengembangan ekonomi daerah
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal
- Menentukan, memonitori, mengevaluasi program dan mengorganisir
- Menyuarakan aspirasi sektor swasta
- Menjembatani kemitraan antara stakeholder
- Mengkoordinasi kebijakan antar sektor dan SKPD

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini, bertujuan mencari letak terkonsentrasinya industri manufaktur dan subsektor unggulan pada lokasi penelitiannya. Pada penelitian lainnya juga bertujuan mencari besar tingkat konsentrasi spasial, sektor unggulan dan spesialisasi suatu wilayah. Beberapa

temuan hasil penelitian mengenai konsentrasi spasial dan spesialisasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metodologi	Hasil
1.	Erlangga Agustino Landiyanto (2004)	Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Tinjauan Empiris di Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dimana dan pada subsektor apa industri manufaktur kota Surabaya Terkonsentrasi Mengetahui mengapa dan bagaimana industri manufaktur kota Surabaya terkonsentrasi sehingga dapat dianalisis mengenai kebijakan dalam mengembangkan industri manufaktur kota Surabaya 	<ol style="list-style-type: none"> LQ (Location Quotient) Ellison Glaeser indeks Maurel Sedillot indeks 	<ol style="list-style-type: none"> Industri manufaktur di Surabaya terkonsentrasi kecamatan Rungkut, Tandes dan Sawahan Subsektor unggulan Surabaya adalah industri makanan, minuman dan tekstil serta industri logam, mesin dan peralatan.
2.	Erlangga Agustino Landiyanto (2005)	Spesialisasi dan Konsentrasi Spasial Pada Industri Manufaktur di Jawa Timur	Mengetahui dimana dan seberapa besar tingkat konsentrasi spasial industri manufaktur di Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> LQ (Location Quotient) Herfindahl Indeks Elison-Glaeser Indeks Indeks Spesialisasi Regional Indeks Spasialisasi Bilateral 	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan Kabupaten industri manufaktur Jawa Timur terkonsentrasi di Kota Surabaya, Kab Gresik, Kab Sidoarjo, Kediri, Kab Pasuruan dan Malang. Sub sektor andalan Propinsi Jawa Timur berdasarkan spesialisasi tembakau (ISIC 3.1), sub industri tekstil, pakaian jadi, kulit (ISIC 3.2) dan sub industri barang galian non logam (kecuali minyak bumi dan batubara) (ISIC 3.6)

Nurul Istifadah (2005)

Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kawasan Strategik Surabaya-Sidoarjo-Gresik

1. Mengetahui sektor unggulan yang perlu dikembangkan sebagai potensi daerah sehingga tercapai efektivitas investasi di kawasan strategik Surabaya-Sidoarjo Gresik.
2. Mengetahui besarnya indeks spesialisasi sektor unggulan di kawasan strategik Surabaya-Sidoarjo-Gresik;
3. Menganalisis pemberdayaan sektor unggulan di kawasan Surabaya-Sidoarjo-Gresik; dan
4. Menganalisis strategi pembangunan sektoral untuk masing-masing kabupaten / kota di kawasan Surabaya-Sidoarjo-Gresik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerjanya.

*1. Location Quotient (LQ)
2. Indeks spesialisasi regional
Krugman*

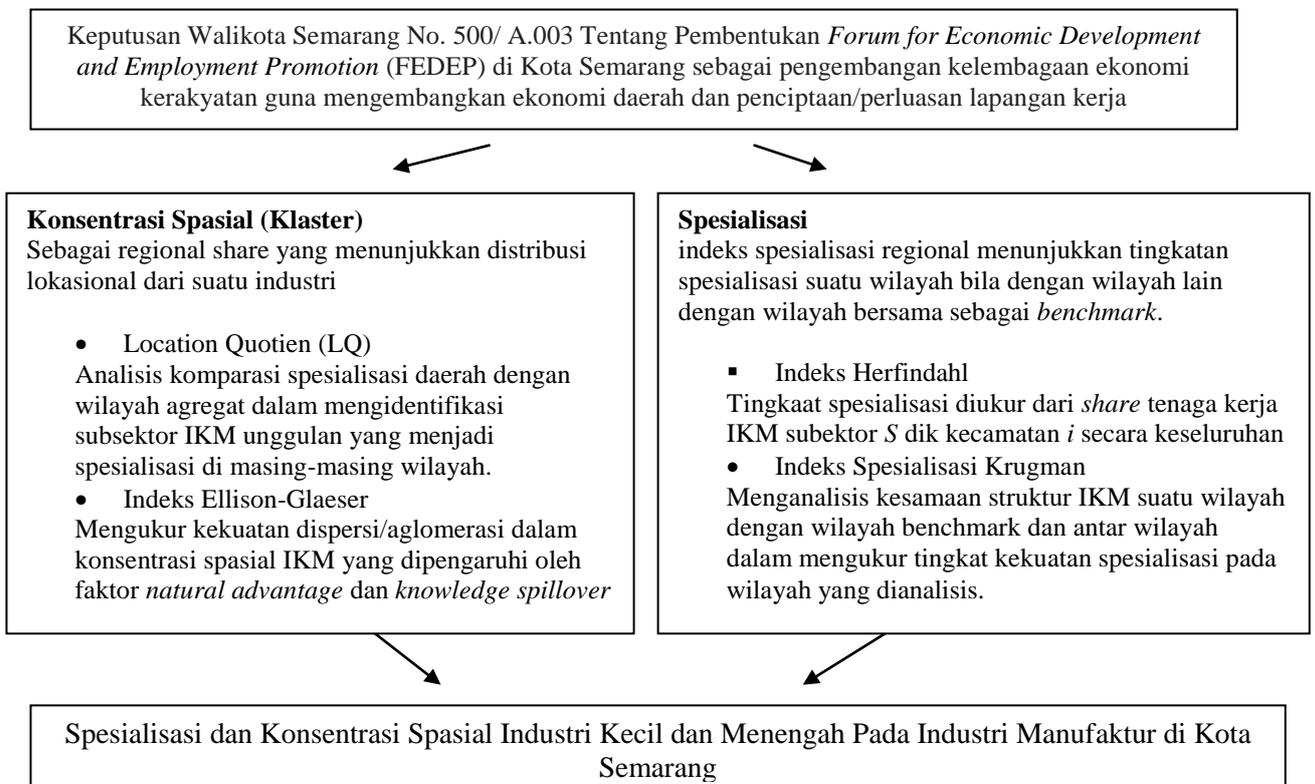
1. Sektor unggulan di Kota Su adalah sektor bang Kabupaten Sidoarjo adalah industri manufaktur Kabupaten Gresik adalah listrik, gas & air bersih.
2. Hasil perhitungan a spesialisasi regional Kr sama dengan nol. Artinya antar ketiga daerah Sur Sidoarjo-Gresik tidak m spesialisasi lapangan usaha daerah tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan mengambil sampel daerah dan periode yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Daerah yang menjadi objek penelitian adalah 16 kecamatan di Kota Semarang. Periode penelitian yang akan dilakukan adalah tahun 1999 dan 2006. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode LQ, Indeks spesialisasi regional dan bilateral, Ellison Glaeser Indeks dan Indeks spesialisasi regional Krugman.

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan latar belakang dan tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran seperti dibawah ini

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian dan definisi operasional ini menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Industri Kecil

Industri Kecil adalah kegiatan Ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar satu milyar rupiah atau kurang. Industri kecil ini memiliki satuan unit usaha.

2. Industri Menengah

Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah. Industri menengah ini memiliki satuan unit usaha.

3. Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah

Defnisi tenaga kerja dalam penelitian ini adalah penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas yang terserap dan bekerja di sektor industri kecil dan menengah di Kota Semarang. Satuan yang dipakai dalam tenaga kerja adalah orang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang bersumber dari laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kota Semarang maupun Badan Pusat Statistik Propinsi Kota Semarang, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Kota Semarang, sumber internet, serta informasi berupa arsip-arsip dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, serta data pendukung lain dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini data yang diolah secara kuantitatif adalah data tenaga kerja industri menengah dan kecil di setiap subsektor industri kecil dan menengah di Kota Semarang periode tahun 1999 sampai 2006. Data yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini memiliki alasan utama berkaitan dengan kelengkapan data yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan data dari Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik dan sumber lain digunakan sebagai data pendukung.

Dinamisasi jumlah tenaga kerja industri kecil dan menengah di Kota Semarang berdampak pada minimnya ketersediaan data yang dapat merepresentasikan jumlah tenaga kerja IKM subsektor klasifikasi ISIC 2 digit di Kota Semarang yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu analisis yang dilakukan

yaitu penggabungan data dari *time series* dan *cross section*. Data yang digunakan adalah 8 tahun yang berbeda dari 1999 sampai 2006. sebagai tahun analisis dengan penyesuaian kelengkapan data dan penetapan tahun. Alasan pemilihan tahun 1999 sampai 2006 adalah melihat gambaran perkembangan spesialisasi dan konsentrasi spasial industri kecil dan menengah di Kota Semarang. Walaupun data tahun analisis yang digunakan kurang baru terkait oleh keterbatasan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, diharapkan data ini tetap mampu mewakili gambaran spesialisasi dan konsentrasi spasial IKM Kota Semarang.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Dalam analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah LQ, Indeks Spesialisasi Krugman, Indeks Herfindahl, Indeks Ellison Glaeser.

3.4 Spesialisasi

Spesialisasi didefinisikan sebagai keunggulan yang dimiliki suatu wilayah dalam mengoptimalkan sumberdaya lokal, dimana subsektor IKM di wilayah tersebut memiliki kontribusi lebih besar dibanding wilayah agregat. Tingkat spesialisasi diukur dari *share* tenaga kerja IKM subsektor *S* di kecamatan *i*

terhadap Jumlah tenaga kerja IKM di kecamatan i secara keseluruhan (Nurul, 2005). Spesialisasi IKM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Spe} \\ \text{Spesialisasi IKM} = \frac{\text{Tenaga kerja IKM pada subsektor} \\ S \text{ di kecamatan } i}{\text{Jumlah tenaga kerja IKM di} \\ \text{kecamatan } i} \times 100\% \quad (3-1)$$

Di mana, i menunjukkan kecamatan di Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian, sedangkan S menunjukkan subsektor IKM berdasarkan klasifikasi ISIC dua digit. Angka tertinggi dari spesialisasi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki distribusi tenaga kerja yang paling tidak merata dan cenderung terspesialisasi pada suatu wilayah di Kota Semarang. Sebaliknya, semakin rendah angka spesialisasi menunjukkan wilayah tersebut memiliki distribusi tenaga kerja yang paling

merata di Kota Semarang. Satuan dari spesialisasi IKM ini adalah nilai.

Spesialisasi IKM dapat dilihat dari besaran indeks spesialisasi Krugman dan indeks spesialisasi bilateral. Keduanya menganalisis kesamaan struktur IKM suatu wilayah dengan wilayah *benchmark* dan antar wilayah dalam mengukur tingkat kekuatan spesialisasi pada wilayah yang dianalisis. Tidak adanya kesamaan struktur antara wilayah menunjukkan bahwa masing-masing wilayah terspesialisasi pada industri unggulan masing-masing. Sebaliknya, adanya kesamaan struktur industri menunjukkan semakin berkurangnya tingkat spesialisasi wilayah yang berarti semakin menurunnya daya saing daerah.

Apabila didasarkan pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Head, Meyer & Ries (Erlangga, 2005), penelitian ini merupakan pengamatan empiris tentang konsentrasi spasial dan deskriptif dalam suatu titik waktu. Penggunaan tahun 1999 dan 2006 sebagai tahun analisis menunjukkan ada dua titik waktu yang dianalisis pada penelitian ini. Dua titik waktu tersebut akan dianalisis secara kuantitatif dan akan dibahas secara secara kualitatif.

Dasar analisis pada penelitian ini bersumber pada dua indikator yang merupakan dasar dalam penyusunan indeks spesialisasi dan konsentrasi spasial seperti yang dikemukakan oleh Knarvik et al dalam Erlangga (2005) yaitu:

$$(3-2) \quad V_i^S = \frac{TK_i^S}{TK_i}$$

V_i^S merupakan spesialisasi IKM yang diukur dari *share* tenaga kerja subsektor industri kecil dan menengah S di kecamatan i (TK_i^S) terhadap tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah kecamatan i secara keseluruhan (TK_i). Perlu diperhatikan bahwa i melambangkan kecamatan di Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian, sedangkan S melambangkan subsektor industri kecil dan menengah berdasarkan klasifikasi ISIC 2 digit. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Aiginger dan Hansberg (2003), kontribusi tenaga kerja subsektor industri kecil dan menengah S di kecamatan i terhadap tenaga kerja kabupaten secara keseluruhan dapat menunjukkan subsektor industri kecil dan menengah apa yang merupakan spesialisasi subsektor IKM dari kabupaten dan kota i .

$$V^S = \frac{TK^S}{TK} \quad (3-3)$$

Spesialisasi pada tingkatan yang lebih luas dilambangkan oleh V^S yang merupakan *share* dari tenaga kerja subsektor S (TK^S) terhadap tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di Kota Semarang secara keseluruhan (TK). V^S menunjukkan subsektor industri kecil dan menengah yang merupakan spesialisasi dari sektor industri kecil dan menengah Kota Semarang. Penggunaan data tenaga kerja dalam menganalisis spesialisasi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Erlangga (2005).

(3-4)

Pada sisi lain, Krugman ¹ $S_i^S = \frac{TK_i^S}{TK^S}$ perbedaan struktur industri pada suatu wilayah dengan struktur industri pada wilayah lain maupun seluruh wilayah akan mempengaruhi daya saing wilayah terhadap wilayah yang menjadi standar pengukuran. Hasil penilaian menunjukkan tingkat spesialisasi wilayah yang dianalisis. Oleh karena itu dalam menganalisis spesialisasi suatu daerah digunakan indikator yang digunakan oleh Fujita, et al (1991) yaitu: indeks spesialisasi regional (K_{SPEC}) dan indeks spesialisasi bilateral (B_{SPEC})

Kim (1995) menyatakan bahwa nilai yang menjadi standar pengukuran K_{SPEC} dan B_{SPEC} berkisar antara nilai nol dan dua. Nilai nol menunjukkan bahwa adanya kesamaan struktur industri antara wilayah yang dianalisis dengan wilayah yang dijadikan *benchmark*. Nilai dua menunjukkan tidak adanya kesamaan

struktur antara wilayah yang dianalisis sehingga masing-masing wilayah yang dianalisis terspesialisasi pada industri unggulan masing-masing (Erlangga, 2004).

$$(3-5) \quad K_{SPEC} = \sum_{S=1}^N |V_i^S - V^S|$$

K_{SPEC} atau indeks spesialisasi regional menunjukkan tingkatan spesialisasi suatu wilayah bila dengan wilayah lain dengan wilayah bersama sebagai *benchmark*. Dalam konteks Kota Semarang, yang menjadi *benchmark* dalam menganalisis K_{SPEC} pada i adalah struktur industri Kota Semarang. K_{SPEC} bernilai dua apabila struktur industri industri pada wilayah i tidak memiliki kesamaan dengan struktur industri di Kota Semarang secara keseluruhan. K_{SPEC} bernilai nol apabila struktur industri daerah i memiliki kesamaan dengan struktur industri Kota Semarang secara keseluruhan. K_{SPEC} wilayah i bernilai lebih besar daripada satu sampai dengan lebih kecil sama dengan dua menunjukkan bahwa wilayah i lebih terspesialisasi dari pada wilayah lain di Kota Semarang, Erlangga (2004).

$$B_{SPEC} = \sum_{S=1}^N |V_i^S - V_j^S| \quad (3-6)$$

Pada sisi lain, B_{SPEC} digunakan untuk melihat apakah ada persamaan struktur antara dua wilayah yang dianalisis secara bilateral. Dalam Kota Semarang, wilayah yang dianalisis secara bilateral adalah wilayah i dan j dimana j juga melambangkan kecamatan di Kota Semarang. B_{SPEC} sebesar dua

menunjukkan bahwa wilayah i dan j memiliki struktur industri yang berbeda. B_{SPEC} sebesar nol menunjukkan bahwa wilayah i dan j memiliki kesamaan struktur industri yang sangat berkaitan dengan konsentrasi spasial pada IKM.

3.5 Konsentrasi Spasial

Konsentrasi spasial merupakan mengelompoknya industri pada suatu wilayah tertentu secara spasial. Besarnya konsentrasi spasial diukur dari *share* tenaga kerja IKM subsektor S di kecamatan i terhadap tenaga kerja IKM subsektor S di seluruh kecamatan (Nurul, 2005). Konsentrasi spasial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Konsentrasi Spasial IKM} = \frac{\text{Tenaga kerja IKM pada subsektor } S \text{ di kecamatan } i}{\text{Jumlah tenaga kerja IKM subsektor } S \text{ di seluruh kecamatan di Kota Semarang}} \times 100\% \quad (3-7)$$

Di mana, i menunjukkan kecamatan di Kota Semarang yang menjadi sampel penelitian, sedangkan S menunjukkan subsektor IKM berdasarkan klasifikasi ISIC dua digit. Angka tertinggi dari konsentrasi spasial ini menunjukkan bahwa subsektor industri tersebut memiliki distribusi spasial yang paling tidak merata dan cenderung terkonsentrasi spasial pada suatu wilayah di Kota Semarang. Sebaliknya, semakin rendah angka konsentrasi spasial menunjukkan subsektor industri memiliki distribusi spasial yang paling merata di Kota Semarang. Satuan dari nilai konsentrasi spasial ini adalah nilai. Identifikasi

subsektor IKM unggulan atau bukan unggulan yang menjadi spesialisasi di masing-masing wilayah dilihat dari besarnya nilai indeks *Location Quotient* (LQ)

Pada sisi lain, Aiginger dan Hansberg (2003) menyatakan bahwa konsentrasi dapat didefinisikan sebagai regional *share* yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu industri. Pada konteks penelitian ini, konsentrasi spasial yang dilambangkan dengan S_i^S yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja subsektor S di kecamatan i (TK_i^S) terhadap tenaga kerja subsektor S di seluruh Kota Semarang (TK^S). Penggunaan data tenaga kerja pada konsentrasi spasial berdasarkan penelitian yang dilakukan Dyah (2004).

(3-8)

$$X_i = \frac{TK_i}{TK}$$

Sementara konsentrasi spasial yang lebih luas di lambangkan dengan X_i yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja IKM kecamatan i (TK_i) terhadap tenaga kerja IKM Kota Semarang (TK). Perbandingan nilai X_i antara daerah $i=$ (1.....N) menunjukkan distribusi lokasional IKM di Kota Semarang. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan adalah dalam menganalisis spesialisasi daerah yang disebut Hoover-Balassa koefisien (Erlangga, 2004). Pendekatan ini menyatakan bahwa spesialisasi relatif dalam industri pada suatu wilayah terjadi apabila spesialisasi industri pada suatu wilayah lebih besar daripada spesialisasi industri pada wilayah *agregat* (Mudrajad, 2004).

(3-9)

$$LQ = \frac{V_i^S}{V^S} = \frac{S_i^S}{X_i}$$

Apabila $V_i^S > V^S$ atau $S_i^S > X_i$ maka $LQ > 1$

Apabila $V_i^S < V^S$ atau $S_i^S < X_i$ maka $LQ < 1$

Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa subsektor S terspesialisasi secara relatif di wilayah i . Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori basis, Subsektor S merupakan subsektor unggulan yang layak untuk dikembangkan di wilayah i dan demikian pula sebaliknya apabila $LQ < 1$ maka subsektor S bukan merupakan subsektor unggulan daerah tersebut.

Terkonsentrasi atau tersebarnya IKM juga dapat diketahui dengan indeks Herfindahl, dimana semakin tinggi nilai indeks Herfindahl maka distribusi lokasi IKM semakin tidak merata dan IKM cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Selain itu, tingkat konsentrasi spasial IKM dalam suatu daerah dapat diukur dari besarnya kekuatan dispersi atau agglomerasi yang dipengaruhi oleh faktor *natural advantage* dan *knowledge spillover*, hal tersebut terlihat dari besarnya indeks Ellison-Glaeser.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan menganalisis konsentrasi spasial adalah Herfindahl Indeks yang dilambangkan dengan H^S yang menunjukkan distribusi lokasi pada subsektor S di wilayah Kota Semarang. Nilai H^S berkisar antara nol dan satu, semakin tinggi H^S maka distribusi lokasi semakin tidak merata dan industri kecil dan menengah pada subsektor S cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu

$$H^S = \sum_{i=1}^M (S_i^S)^2 \quad (3-10)$$

Pendekatan lain dalam menganalisis konsentrasi spasial dikemukakan oleh Ellison dan Glaeser (1997), ditujukan untuk mengisolasi efek dari konsentrasi spasial. Model yang dikemukakan diturunkan dari indeks yang berbasis tenaga kerja:

$$g_{EG} = \sum_{i=1}^M (S_i^S - X_i)^2 \quad (3-11)$$

g_{EG} biasa disebut dengan Gini lokasional, menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor dan konsentrasi spasial antara beberapa wilayah. Indeks yang dikembangkan dari g_{EG} telah digunakan oleh Ellison dan Glaeser untuk menganalisa konsentrasi spasial dari industri manufaktur di Amerika Serikat, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Ellison dan Glaeser berkesimpulan bahwa pada industri yang terspesialisasi, konsentrasi spasial terjadi karena *natural advantage* dan *knowledge spillover* (disebut juga Marshal-Arrow-Romer atau MAR eksternalitas). Akan tetapi sangat sulit untuk mengukur dorongan dari *knowledge spillover* terhadap konsentrasi spasial. Oleh karena itu, Ellison dan Glaeser (1999) mengemukakan tentang kontribusi *natural advantages* berdasarkan *factor endowment* yang secara simultan mempengaruhi dan mendorong skala ekonomi internal perusahaan, untuk itu Ellison dan Glaeser membangun indikator untuk merefleksikan kontribusi dari *natural advantages* dan *knowledge spillover* yaitu:

$$\gamma_{EG} = \frac{G_{EG} - H^f}{1 - H^f} \quad (3-12)$$

Indikator γ_{EG} tersebut dibangun dari persamaan (3-10) dan persamaan (3-11), dimana:

$$(3-13) \quad G_{EG} = \frac{g_{EG}}{1 - \sum_{i=1}^M (X_i)^2}$$

G_{EG} atau yang biasa disebut dengan *raw concentration* menunjukkan besarnya kekuatan agglomerasi yang mendorong konsentrasi spasial dan disusun berdasarkan persamaan.

$$(3-14) \quad H = \sum_{f=1}^L (Z_f^S)^2$$

H^f merupakan *firm size's herfindahl* yang menunjukkan distribusi tenaga kerja pada industri sedangkan Z_f^S adalah *firm size* yang dikalkulasi berdasar *share* tenaga kerja firm terhadap tenaga kerja industri. Karena tidak tersedianya data, maka dalam penelitian ini digunakan H sebagai *proxy* untuk menggantikan H^f dengan berdasarkan pada pendekatan yang dilakukan oleh Combes dan Lafourcade dalam Ellison dan Glaeser (1997) dimana:

$$(3-15)$$

$$H = \sum_{i=1}^M (S_i^S)^2$$

Oleh karena itu, dengan mengganti H^f dengan H maka persamaan (3-12)

akan berubah menjadi:

$$\gamma_{EG} = \frac{G_{EG} - H}{1 - H} \quad (3-16)$$

Berdasarkan pengamatan empiris yang dilakukan oleh Ellison dan Glaeser, γ_{EG} menunjukkan pengaruh *natural advantage* dan *knowledge spillover* terhadap konsentrasi spasial dari industri. Ellison dan Glaeser (1997) menyatakan bahwa standar pengukuran dari indeks tersebut adalah: dibawah 0,02 menunjukkan dispersi dan diatas 0,05 menunjukkan terjadinya agglomerasi yang kedua-duanya disebabkan oleh pengaruh *natural advantage* dan *knowledge spiller*.

Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan oleh Ellison Glaeser dalam penelitiannya. Ellison dan Glaeser dalam penelitiannya menentukan 0,02 dan 0,05 sebagai standar pengukuran. Nilai standar pengukuran 0,02 berasal dari *median* γ_{EG} dan standar pengukuran 0,05 berasal dari *mean* γ_{EG} . Pendekatan dalam menentukan standar median dan mean γ_{EG} diikuti oleh berbagai pengamatan empiris antara lain yang dilakukan oleh Maurel dan Sedillot (1999) maupun Lafourcade dan Mion (2003). Oleh karena dalam penelitian ini, standar pengukurannya menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu: nilai γ_{EG} dibawah median γ_{EG} menunjukkan dispersi dan diatas mean γ_{EG} menunjukkan terjadinya aglomerasi dimana terjadinya dispersi dan agglomerasi disebabkan oleh pengaruh *natural advantage* dan *knowledge spillover*.